

LAMPIRAN PERATURAN NAGARI

NOMOR : 05 Tahun 2024

TANGGAL : 25 November 2024



DOKUMEN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI**

**(RKP-NAG)**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



**NAGARI AIR HAJI BARAT**

**KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan Nagari yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Nagari Air Haji yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Nagari ini sebagai referensi untuk pembangunan di Nagari sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari dan Peraturan Menteri Nagari, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Nagari;
3. pencermatan ulang RPJM Nagari;
4. penyusunan rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari;
5. Musrenbang Nagari pembahasan rancangan RKP Nagari dan DU- RKP Nagari; dan
6. musyawarah Nagari pembahasan dan pengesahan RKP Nagari dan DU-RKP Nagari.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Nagari merupakan rencana strategis dari hasil potret Nagari yang telah dilakukan oleh Nagari sendiri semisal Pendataan SDGs Nagari, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Nagari itu sendiri.


Maksud penyusunan RKP Nagari Tahun 2025 Nagari Air Haji adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Nagari yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Nagari, arah dan strategi pembangunan Nagari, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Nagari Tahun 2025 Nagari Air Haji adalah *sebagai berikut:*

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Nagari Air Haji dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan Nagari serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Nagari Air Haji selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Nagari Air Haji

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Nagari Tahun 2025 Nagari Air Haji kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Air Haji ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Nagari yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Nagari Air Haji secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

25 November 2024  
Wali Nagari Air Haji  
Nagari Air Haji



**FEBY OKTAFIANTO**



**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT  
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)  
TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Nagari Air Haji Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas undang- Undang 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77 )
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2021 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2022-2027 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

**dan**

**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2024**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir selatan untuk Tahun 2025
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagari dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 4**

Sistematika RKP Nagari meliputi :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum penyusunan, serta Manfaat penyusunan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI**

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari, Dan Pembiayaan.

**BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

**BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI**

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

**BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari

**BAB V**  
**ISI DAN URAIAN RKP Nagari**

**Pasal 5**

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

Wali Nagari melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LKPPN) Kepada Bupati oleh Wali Nagari Tahun 2025


**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Air Haji Barat.

Diundangkan di Nagari Air Haji Barat  
Pada Tanggal 25 November 2024

Sekretaris Nagari

  
**YUNOFION**

Ditetapkan di Nagari Air Haji Barat

Pada tanggal 25 November 2024

  
WALI NAGARI  
AIR HAJI BARAT  
  
**FERY OKTAFIANTO**

**LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT NOMOR 05 TAHUN 2024**  
**TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2025**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang 3 Tahun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan

## **A. Mekanisme Penyusunan RKP Nagari**

Mekanisme penyusunan RKP Nagari Air Haji Barat Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari; Menyetakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
2. Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RKP Nagari untuk mencermati pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari; Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
3. Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Nagari mencermati ulang dokumen RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Tim Penyusun RKP Nagari menyusun Rancangan RKP Nagari dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Nagari; Pagu indikatif Nagari; Pendapatan Asli Nagari; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; serta Hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Nagari. Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan berita acara kepada Wali Nagari tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

6. Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Nagari yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
7. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari kepada Bamus untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

## **B. Visi dan Misi Nagari Air Haji Barat**

Rumusan visi dan Misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi kedepan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan cirri-ciri khas atau unik masyarakat kedepan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan kedalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat Nagari Hasil penggalian visi dan misi.

### **VISI Nagari Air Haji Barat**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan visi Nagari Air Haji Barat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Nagari Air Haji Barat seperti Pemerintahan Nagari, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Masyarakat Nagari Pada Umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Nagari seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan di atas visi Nagari Air Haji Barat adalah **“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Nagari Air Haji Barat yang Agamais, Maju Sejahtera, Mandiri, Unggul dan Berprestasi”**

### **MISI NAGARI AIR HAJI BARAT**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi Nagari tersebut. Visi berada diatas Misi ,pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi

agar dapat dioperasionalkan /dikerjakan sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunanya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari Air Haji Barat, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari Air Haji Barat adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian rakyat melalui pengembangan hasil usaha pertanian.
3. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil, industry rumah tangga , melalui pengembangan modal usaha.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program wajib belajar melalui sistem Program Pendidikan Nasional.
5. Menghidupkan dan meningkatkan kembali kegiatan organisasi kelembagaan yang di Nagaari Air Haji Barat
6. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Recorving, rehabilitas Pemerintahan Nagari

## **1.2 Landasan Hukum**

RKP Nagari Air Haji Barat Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2019

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKP Nagari Air Haji Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Air Haji Barat tahun 2024

Tujuan dari penyusunan RKP Nagari Air Haji Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Nagari Air Haji Barat tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Nagari Air Haji Barat Tahun 2025 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Nagari Air Haji Barat yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2024

#### 1.4 Manfaat

Manfaat dari penyusunan RKP Nagari Air Haji Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan nagari
2. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra nagari
3. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
4. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

#### 2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan nagari tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2025 yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten pesisir selatan serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli nagari, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan desa tahun 2025 sebesar Rp. 1.567.924.755,-(Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

#### 1. Pendapatan asli nagari

- Hasil usaha nagari Rp...
- Hasil kekayaan nagari Rp..
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Rp.....
- Lain-lain pendapatan nagari yang sah Rp 2.000.000,-

#### 2. Pendapatan Transfer Rp.....

- Alokasi dana desa Rp 522.396.287,-
- Dana Desa Rp. 1.027.137.000,-
- Bagi Hasil Pajak/Restribusi kabupaten Rp. 14.263.468,-
- Bagi Hasil Restribusi Rp. 0,-

#### 3. Bantuan keuangan perintah provinsi Rp...

#### 4. Bantuan Pemerintah Kabupaten Rp....

## 2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari

Belanja nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

### Uraian Jumlah (Rp)

- Belanja Pegawai : Rp. 423.802.956,00,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 779.591.158,20,-
- Belanja Modal : Rp. 243.026.040,00,-
- Belanja Tidak Terduga : Rp. 95.500.000,00,-

## 2.3 Pembiayaan

Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**BAB III**  
**EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya**

Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari Tahun 2024 dalam bidang

1. Pembangunan yang didanai oleh alokasi dana desa
2. pembangunan yang di danai oleh dana desa terlaksana %
3. pemberdayaan yang di danai oleh dana desa terlaksana %
4. pembinaan yang didanai oleh alokasi dana desa terlaksana %

**3.1.1 Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa**

1. penyelenggaraan pemerintahan nagari yang di danai oleh alokasi dana desa terlaksana 97%

**Tabel 1.1**

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun 2024

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	AHB	12 bulan	51.600.000,-	ADD	12 bulan	51.600.000,-	ADD
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	AHB	12 bulan	284.100.000,-	ADD	12 bulan	284.100.000,-	ADD
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali dan Perangkat	AHB	12 bulan	17.602.956,-	PBH, ADD	12 bulan	17.602.956,-	PBH, ADD
4	Operasional kantor	AHB	12 bulan	83.733.712,30	ADD,DLL	12 bulan	83.733.000,00	ADD,DLL
5	Tunjangan BPD	AHB	12 bulan	68.700.000,-	ADD	12 Bulan	68.700.000,-	ADD

6	Penyediaan Operasional BPD	AHB	12 bulan	10.000.000,-	ADD	12 Bulan	10.000.000,-	ADD
7	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa bersumber dari Dana Desa	AHB	12 bulan	30.814.110	DD	12 Bulan	27.922.500,-	DD
8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Kantor	AHB	12 bulan	4.550.000,-	PBH, ADD	12 bulan	4.550.000,-	PBH
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	AHB	12 bulan	1.204.000,-	ADD	12 bulan	1.100.000,-	PBH
10	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Gedung prasarana kantor desa	AHB	12 bulan	102.713.700,-	DD	12 bulan	100.829.900,-	DD
9	Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa (Dipilih)	AHB	12 bulan	10.442.000,-	DD	12 bulan	3.194.000,-	DD
10	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif	AHB	12 bulan	1.928.000,-	DLL	12 bulan	1.928.000,-	DD
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa(Reguler)	AHB	12 bulan	8.663.000,-	DD	12 Bulan	8.663.000,-	DLL
12	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus,rembug desa no regular)	AHB	3 kali	17.980.000,-	DD	3 Kali	15.030.000,-	DD
13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa,APBDesa Perubahan,LPJ dll)	AHB	12 Bulan	16.374.000,-	DD	12 bulan	15.769.000,-	DDS
14	Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa dan Informasi Kepada	AHB	12 bulan	2.876.000,-	DD	12 bulan	2.876.000,-	DD

	Masyarakat							
15	Pengembangan system informasi desa	AHB	12 bulan	1.500.000,-	DD	12 bulan	1.500.000,-	DD
16	Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian administrasi agrarian)	AHB	12 bulan	2.000.000,-	DLL	12 bulan	2.000.000,-	DLL
17	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	AHB	12 bulan	1.751.000,-	PBH	12 bulan	1.751.000,-	PBH

### 3.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada bidang pembangunan desa yang didanai oleh dana desa terdiri dari beberapa kegiatan pembangunan antra lain

Tabel 1.2

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan nagari Tahun 2024

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	AHB	12 bulan	89.808.000,-	DD	12 bulan	89.808.000,-	DD
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ POLINDES milik desa	AHB	12 bulan	46.127.000,-	DD	12 bulan	46.127.000,-	DD
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif	AHB	12 bulan	32.063.000,-	DD	12 bulan	32.063.000,-	DD

	)							
4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	AHB	12 bulan	5.720.000,-	DD	12 bulan	5.420.000,-	DD
5	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	AHB	12 bulan	9.072.000,-	ADD	12 bulan	0,-	ADD
6	Pengasuh Bersama atau Bina Keluarga Balita	AHB	12 bulan	30.276.000,-	DD	12 bulan	30.076.000,-	DD
7	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu	AHB	12 bulan	24.500.000,-	DD	12 bulan	24.500.000,-	DD
8	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	AHB	12 bulan	123.256.000,-	DD	12 bulan	43.152.620,-	DD
9	Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	AHB	12 bulan	21.313.000,-	DD	12 bulan	20.488.760,-	DD
11	JAMBANISASI	AHB	12 bulan	45.836.000,-	DD	12 bulan	42.864.930,-	DD
12	Kegiatan pelestarian lingkungan hidup (BBGRM)	AHB	12 bulan	5.278.000,-	DD	12 bulan	5.278.000,-	DD
13	Penyelenggaraan informasi public desa (poster, baliho, dll)	AHB	12 bulan	63.730.500,-	DD	12 bulan	61.602.000,-	DD
14	Pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi local desa	AHB	12 bulan	21.688.440,-	DD	12 bulan	20.707.500,-	DD

### 3.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

**Tabel 1.3**

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Tahun 2024

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Persiapan Kesiap Siagaan Bencana skala local desa	AHB	12 bulan	22.000.000,-	DD	12 bulan	15.494.000,-	DD
2	Pembinaan grup Kesenian dan kebudayaan Tingkat desa	AHB	12 bulan	20.674.000,-	DD	12 bulan	21.688.440,-	DD
3	Penyelenggaraan festival/kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan	AHB	12 bulan	26.292.000,-	DD	12 bulan	26.292.000,-	DD
4	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan Tingkat desa	AHB	12 bulan	34.613.000,-	DD	12 bulan	34.593.000,-	DD
5	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga Tingkat desa	AHB	12 bulan	30.580.000,-	DD	12 Bulan	30.580.000,-	DD
6	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasana kepemudaan	AHB	12 bulan	32.892.707,-	DD	12 Bulan	30.203.250,-	DD
7	Pembinaan Lembaga adat	AHB	12 bulan	2.500.000	DD	12 bulan	0	PBH
8	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	AHB	12 bulan	9.064.524,-	DD	12 bulan	0	DD
9	Pembinaan PKK	AHB	12 bulan	4.402.044,90	DD	12 bulan	614.000,-	DD

10	Pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan	AHB	12 bulan	8.557.500,-	DD	12 bulan	7.957.500,-	DD
----	--	-----	----------	-------------	----	----------	-------------	----

### 3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada bidang pemberdayaan yang di danai oleh dana desa dana desa terlaksana dengan baik dan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain.

**Tabel 1.4**

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun 2024

	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Bantuan perikanan (bibit/pakan/DLL)	AHB	12 bulan	48.451.000,-	DD	12 bulan	0	DD
2	Peningkatan Produksi Tanaman pangan	AHB	12 bulan	33.721.000,-	DD	12 bulan	0	DD
3	Peningkatan Kapasitas BPD	AHB	12 bulan	6.750.000,-	DD	12 bulan	6.750.000,-	DD
4	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	AHB	12 bulan	3.921.000,-	DD	12 bulan	3.921.000,-	DD
5	Pelatihan pengelolaan bum desa (pelatihan yang dilaksanakan pemerintahan nagari)	AHB	12 bulan	21.428.960,-	DD	12 bulan	0	DD

### 3.1.5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak

Pada bidang pemberdayaan yang di danai oleh dana desa dana desa terlaksana dengan baik dan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain.

**Tabel 1.5**

**Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2024**

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penanganan keadaan darurat	AHB	12 bulan	10.000.000,-	DD	12 bulan	3.990.000,-	DD
2	Penanganan keadaan mendesak	AHB	12 bulan	72.000.000,-	DD	12 bulan	72.000.000,-	DD

**3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari**

Berdasarkan peraturan nagari nomor.... Tahun 2021 tentang RPJM. Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pembinaan masyarakat nagari, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

**3.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa**

- Item kegiatan.....
- .....
- .....

**3.2.2. Bidang pelaksanaan pembangunan**

- Item kegiatan.....
- .....
- .....

**3.2.3. Bidang pembinaan masyarakat**

- Item kegiatan.....
- .....
- .....

**3.2.4. Bidang pemberdayaan masyarakat**

- Item kegiatan.....
- .....
- .....

### 3.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

- Item kegiatan.....
- .....
- .....

### 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

- Item kegiatan.....
- .....
- .....

### 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

Masalah tersebut memiliki :

- Item kegiatan.....
- .....
- .....

**BAB IV**  
**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM / PEMBANGUNAN NAGARI**

**4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari**

Prioritas program pembangunan skala nagari merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh nagari dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, Prndayagunaan sumberdaya alam, pelestarianadat istiadat dan sosial budaya nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan nagari. Adapun kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran nagari, kewenangan nagari dan secara teknis dilapangan nagari mempunyai sumber daya.

Tabel 1.5

RKP Nagari Air Haji Barat Tahun anggaran 2025 Nagari Air Haji Barat

<b>NO</b>	<b>BIDANG DAN KEGIATAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>LOKASI</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
	1. Belanja Pegawai	Meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah Nagari guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.	Air Haji Barat
	2. Tunjangan dan Operasional Bamus Nagari	Meningkatkan kinerja Bamus Nagari	Air Haji Barat
	3. Operasional Perkantoran	Memenuhi kebutuhan administrasi	Air Haji Barat

		pemerintah nagari meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nigari	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Memenuhi kebutuhan pemerintah nagari meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nigari	Air Haji Barat
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan	Memenuhi kebutuhan pengelolaan administrasi kependudukan dan kearsipan	Air Haji Barat
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan,dan musyawarah Nagari	Air Haji Barat
<b>II</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>		
	Pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan	Air Haji Barat
	Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Air Haji Barat
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan ruang dan pekerjaan umum	Air Haji Barat
	Kawasan Pemukiman	Memenuhi Kawasan pemukiman yang layak	Air Haji Barat
	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelestrain lingkungan hidup	Air Haji Barat
	Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Informasi dan kominukasi	Air Haji Barat

<b>III</b>	<b>Bidang Pembinaan kemasyarakata Desa</b>		
	Pemberdayaan Keagamaan	Memenuhi kebutuhan Rohani	
	Kepemudaan dan olahraga	Memenuhi kebutuhan jasmani	
	Kelembagaan Masyarakat	Memenuhi kebutuhan kelembagaan	
<b>IV</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
	Perikanan dan Kelautan	Memenuhi kebutuhan bahan pangan kelautan	Air Haji Barat
	Pertanian dan Peternakan	Memenuhi kebutuhan pangan hewani dan nabati	Air Haji Barat
	Dukungan Penanaman Modal	Memenuhi kebutuhan Modal BumNag	Air Haji Barat
<b>V</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak</b>		
	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana	Air Haji Barat
	Keadaan Darurat	Penanganan keadaan darurat	Air Haji Barat
	Penanganan Keadaan Darurat	Penanganan keadaan darurat	Air Haji Barat

#### **4.2 Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat**

Prioritas program pembangunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat nagari Air Haji Barat tetapi pemerintah nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama

kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan nagari. Kedua, secara pembiayaan nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) oleh delegasi peserta nagari yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Tabel 1.6

Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2025

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
1	Rehabilitasi Kantor Desa	APBDKAB	Labuhan Tanjak
<b>II</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>		
1	Pembukaan Jalan Baru dari Bediang Ke Banda Gadang	APBDKAB, APBDPROV	Labuhan Tanjak
2	Pembuatan Stadium Mini Secara Bertahap	APBDKAB	Labuhan Tanjak
3	Pengaspalan Jalan Nagari Air Haji Barat	APBDKAB	SeNagari Air Haji Barat
4	Shelter Tsunami	APBDPROV,APBN	Labuhan Tanjak
5	Damkar (Mobil Pemdam Kebakaran)	APBDKAB, APBDPROV, APBN	Durian Pandaan
6	Irigasi Sawah Senagari Air Haji Barat	APBDKAB, APBDPROV	Air Haji Barat

7	Pengaman Tebing Sungai	APBDKAB, APBDPROV,APBN	Labuhan Tanjak
8	Normalisasi Banda SeNagari Air Haji Barat	APBDKAB, APBDPROV	Air Haji Barat
9	Pembangunan Pangkalan Pelelangan Ikan (PPI)/Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	APBDKAB, APBDPROV,APBN	Labuhan Tanjak
10	Nama Jalan Senagari Air Haji Barat	APBDKAB, APBDPROV	Air Haji Barat
	Wisata Mangrove	APBDKAB	Labuhan Tanjak
11	Wisata Ikan Larangan	APBDKAB	Labuhan Tanjak
12	Wisata Pantai Pincalang Gadih	APBDKAB	Labuhan Tanjak
<b>III</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>		
1	Pembinaan Group Kesenian	APBDKAB	Air Haji Barat
2	Pestival Kesenian Adat dan Budaya	APBDKAB	Air Haji Barat
3	Nagari Bersih Tanpa Narkoba	APBDKAB	Air Haji Barat
<b>IV</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1	Pelatihan Bordir	APBDKAB	Air Haji Barat
2	Pelatihan Menjahit	APBDKAB	Air Haji Barat
3	Pelatihan Tata Boga	APBDKAB	Air Haji Barat
<b>V</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak</b>		

1	Penanggulangan bencana	DD, APBDKAB	Air Haji Barat
---	------------------------	-------------	----------------

#### 4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

ADD : Rp.

DD : Rp.

APBD Kabupaten :-

APBN2 :-

Tabel 1.7

Pagu Indikatif Nagari Air Haji Barat Tahun 2025

	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
<b>I.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
1	Penghasilan tetap Wali Nagari		51.600.000			
2	Penghasilan Tetap Perangkat		310.500.000			
3	Jaminan Sosial bagi Wali dan Perangkat		4.017.708			
4	Operasional Kantor		16.000.000			
5	Tunjangan BPD		68.700.000			
6	Operasional BPD		5.000.000			

	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
8	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			1.411.000		
9	Penyusunan, Pendataan dan Pemuktahiran Profil Desa	1.000.000				
10	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa(regular)	6.938.000				
11	Penyelenggaraan musyawarah desa Lainya	18.508.000				
12	Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll)	7.041.000				
13	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan			5.000.000		
14	Penyusunan laporan kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat		3.413.000			
15	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan pilkades, pemilihan	10.576.000				

	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	Kepala Wilayah & BPD					
16	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan			1.441.000		
<b>II.</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor Pakaian dll)	128.018.000				
2	Penambahan RKB PAUD Kasiah Bundo II	6.000.000				
3	Taman Bermain Anak	21.000.000				
4	Sarana Prasarana MDA Nagari Air Haji Barat	31.188.000				
5	Pengelolaan Perpustakaan	5.000.000				
6	Pengadaan Peralatan Qasidah Rebana Senagari Air Haji Barat	17.500.000				
7	Pengadaan Sarana Prasarana Poskesri	12.500.000				
8	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	42.968.000				

	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
9	Penyelenggaraan Pos Yandu	14.981.000				
10	Penyuluhan dan pelatihan Bidang kesehatan	4.000.000				
11	Pengasuh Bersama atau Bina Keluarga Balita	25.738.000				
12	Pembangunan /Rehabiliatasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	10.000.000				
13	Pos Gizi	6.000.000				
14	Pengadaan Bidan Desa di Poskesri Palak Langang	12.000.000				
15	Pemberian Makan Tambahan Balita	5.000.000				
16	Kebun Keluarga Stunting	5.000.000				
17	Penyuluhan gizi anak (stunting) balita dan bumil	5.000.000				
18	Lanjutan pembangunan Balai Pemuda	200.000.000				
19	Irigasi Palak Langang	100.000.000				
20	Irigasi Senagari Air Haji					500.000.000

	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbanga n Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	Barat					
21	Penggalian Banda dekat Lapangan Bola	20.000.000				
22	Pembukaan baru Bediang ke Banda Gadang					200.000.000
23	Normalisasi banda tapian bayua ke Sungai					300.000.000
24	Normalisasi Banda dekat Rumah irat Ijon ke Sungai					500.000.000
25	Pemeliharaan Gorong-gorong Senagari Air Haji Barat	10.000.000				
26	Pengadaan mobil Damkar				900.000.000	
27	Pemeliharaan jalan Usaha Tani Nagari Air Haji Barat				500.000.000	
28	Pengaspalan Jalan Nagari Air Haji Barat					500.000.000
29	Shetlter Tsunami				900.000.000	
30	Perbaikan Jalan Rabat Beton ke Pasar Lama					300.000.000
31	Pengerasan Jalan Pulau					200.000.000

	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	Muncak					0
32	Polongan/Jembatan dari TK/PAUD Ke Mushola					300.000.00 0
33	Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)					300.000.00 0
34	Jambanisasi					300.000.00 0
35	Pelestarian lingkungan hidup					102.500.00 0
36	Informasi komunikasi	50.000.000				
<b>III.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>					
1	Pelatihan kelompok siaga bencana	10.000.000				
2	Kesiap Siagaan Bencana	5.000.000				
3	Pembinaan kesenian tradisional	20.000.000				
4	Pelatihan imam khatib	3.000.000				
5	Pelatihan majelis taklim	6.000.000				
6	Safari Ramadhan	9.000.000				

	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
7	MTQ Tingkat Kecamatan	20.000.000				
8	Pembinaan Kegiatan Olahraga	50.000.000				
9	Pembangunan Stadium Mini Secara Bertahap/Sarpras Olahraga	150.000.000				
10	Pembinaan Lembaga Adat			2.500.000		
11	Pembinaan LPMN			5.000.000		
12	Pembinaan PKK			5.000.000		
13	PHBN	6.000.000				
14	PHBI	6.000.000				
<b>IV.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
1.	Pelatihan Wali dan Perangkat	45.000.000				
2	Bantuan Perikanan (bibit/Pakan/dll)	50.000.000				
3	Peningkatan produksi ketahanan pangan	60.000.000				
4	Peningkatan produksi peternakan	50.000.000				

	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
5	Penyertaan modal BumNag	75.000.000				
6	Pelatihan Pengelolaan BumDesa (Pelatihan yang di selenggarakan Pemerintahan Nagari)	24.000.000				
7	Pendidikan dan Kebudayaan	20.000.000				
<b>V</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>					
1	Penanggulangan Bencana	5.000.000				
2	Keadaan Darurat	5.000.000				
3	BLT	36.000.000				
<b>TOTAL</b>						

**BAB V**  
**PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana konsistensi pemerintahan dan masyarakat nagari saling bekerjasama membangun nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan , pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat nagari. Maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

Pada Tanggal : 25 November 2024

Wali Nagari Air Haji Barat



OKTAFIANTO

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)**

**TAHUN: 2025**

**DESA** : AIR HAJI BARAT  
**KECAMATAN** : LINGGO SARI BAGANTI  
**KABUPATEN** : PESISIR SELATAN  
**PROVINSI** : SUMATERA BARAT

No	Bidang	c.	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Cpaian Tahun 2025	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (sawkelola/Kerja Sama Antar Desa/Kerjasama)
							Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c.	d	e	f	g	l	m	k
		<b>1</b>	<b>Sub Bidang Penghasilan Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan Operasional Pemerintahan Nagari</b>						
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	1 Orang Terpenuhi Pagu	51.600.000	ADD	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	18	11 Orang Belum Memenuhi Pagu Maksimal	11 Orang Terpenuhi Pagu	310.500.000	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat	1,3	12 Orang Terpenuhinya Jaminan Sosial kades dan Perangkat Desa	14 Orang Terpenuhi Pagu	4.017.708	PBH	Kerjasama Pihak Ketiga
		4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	26.695.647,96	ADD,PAD,PBH	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 Orang Terpenuhi Kesejahteraannya	5 Orang Terpenuhi Kesejahteraannya	68.700.000	ADD	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat,ATK,Makan Minum,Pakaian Seragam,listrik dll)	18	Terpenuhinya Operasional BPD	Terpenuhinya Operasional BPD	5.000.000	ADD	Swakelola
		7	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Bersumber dari Dana Desa	18	Terpenuhinya Kebutuhan Reguer	Terpenuhinya Kebutuhan Reguer	22.924.500	DD	Swakelola
		<b>2</b>	<b>Sub Bidang Sarana Dana Prasarana Pemerintahan Nagari</b>						

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Perkantoran/Pemerintahan	18	Belum Memiliki Tempat Penyimpanan Aset yang Baik	Terdapatnya Tempat Penyimpanan Aset Yang Layak	5.000.000	ADD,PBH	Swakelola		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	18	Pembangunan Gedung Kantor Masih Terbangkalai	Terdapatnya Gedung Kantor Yang Layak	100.000.000	DD	Swakelola		
		3	Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa	18	Atap Rusak	Terpeuhinya Kegiatan Prasarana Desa	5.000.000	ADD	Swakelola		
		<b>3</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan</b>								
		1	Penyusunan/ Pendataan /Pemuktahiran Profil Desa	18	Indek Desa Membangun	Terbukukanya IDM Nagari Air Haji Barat	1.000.000	DD	Swakelola		
		2	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Parisipatif	1	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Terdapatnya Data Yang Valid	2.000.000	DLL	Swakelola		
		<b>4</b>	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan</b>								
		1	Penyeelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	18	Penyusunan APBDesa	Terbukukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari	6.938.000	DD	Swakelola		
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	18	Musyawarah Desa	Terlaksannya Kegiatan di Desa dengan baik	18.508.000	DD	Swakelola		
		3	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa,APBDesa Perubahan,LPJ dll)	18	Penyusunan Laporan Keuangan Desa	Terbukukan Laporan Keuangan Nagari Nagari	7.041.000	DD	Swakelola		
		4	Penyusunan Laporan Kepala Desa ,LPPDesa Dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Penyusunan Laporan Kepala Desa	Terbukukan Laporan Pertanggung Jawaban Wali Nagari	3.413.000	DD	Swakelola		
		5	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan Kepala Wilyah& BPD	18	Pemilihan BPD	Terpilihny BPD yang Baru	10.576.000	PBH	Swakelola		
		<b>5</b>	<b>Sub Bidang Pertanian</b>								

	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	18	Pemungutan PBB	PBB Telah di pungut oleh Kolektor Pajak	14.411.000	PBH	Kerjasama Pihak Ketiga
		<b>JUMLAH</b>				<b>663.324.856</b>		
<b>1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>						
	1	Penyelenggaraan PAUD TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor Pakaian dll)	4	Penuhuan Kebutuhan Tenaga Pendidik	Terpenuhinya Kebutuhaj Tenaga Pendidik	128.018.000	DD	Swakelola
		Penambahan RKB PAUD Kasiah Bundo II	4	Sarpras Pendidikan	Terpenuhinya sarana Prasarana PAUD	6.000.000	DD	Swakelola
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4	Sarpras Pendidikan	Terpenuhinya sarana Prasarana PAUD	30.000.000	DD	Swakelola
		Taman Bermain Anak	4	Sarana dan Prasana Bermain Anak	Terpenuhinya Sarana Prasarana Bermain Anak	21.000.000	DD	Swakelola
		Sarana Prasarana MDA Nagari Air Haji Barat	4	Sarana dan Prasana MDA Belum Memadai	Terdapatnya Sarana dan Prasarana MDA Yang Layak	31.188.000	DD	Swakelola
		Pengelolaan Perpustakaan	4	Belum Adanya Ruang Pustaka yang Layak	Terdadatnya Ruang Pustaka Yang Layak	5.000.000	DS	Swakelola
		Pengadaan Peralatan Qasidah Rebana SeNagari Air Haji Barat	4	Peralatan Qasidah Rebana Belum Lengkap dan Tidak Memadai Lagi	Terdapatnya Peralatan Qasidah yang Memadai	17.500.000	DD	Swakelola
<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>						
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesri	3	Sarana dan Prasana Poskesri Belum Memadai	Tedapatnya Perlengkapan Poskesri yang Layak	12.500.000	DD	Swakelola

2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB dsb)	3	Pemenuhan Kebutuhan Kader	Terpenuhinya Kebutuhan Kader	42.968.000	DD	Swakelola
3	Penyelenggaraan Pos Yandu (Makan Tambahan,Kils Bumil,Lansia,Insentif)	3	Pemberian Makan Tambahan	Pemberian Makan Tambahan	14.981.000	DD	Swakelola
4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	Tenaga Kader Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Kader	4.000.000	DD	Swakelola
5	Pengasuh Bersama Atau Bina Keluarga Balita	3	Tenaga Kader Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Kader	25.738.000	DD	Swakelola
6	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasana Posyandu	3	Pemeliharaan Poskesri	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Poskesri	10.000.000	DD	Swakelola
7	Pos Gizi	3	Pemberian Makan Tambahan	Pemberian Makan Tambahan	6.000.000	DD	Swakelola
8	Pemberian Makan Tambahan Balita	3	Pemberian Makan Tambahan	Pemberian Makan Tambahan	5.000.000	DD	Swakelola
9	Kebun Keluarga Stunting	3	Masih Tingginya Angka Stunting	Terbantunya Keluarga Stunting	5.000.000	DD	Swakelola
10	Penyuluha Gizi Anak (Stanting) Balita dan Hamil	3	Masih Tingginya Angka Stunting dan Ibu Hamil Kek dan resti	Terbantunya Keluarga Stunting	5.000.000	DD	Swakelola
<b>3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
1	Lanjutan Pembangunan Balai Pelatihan Masyarakat	11	Belum Terdapatnya Balai Pelatihan Yang layak	Terdapatnya Balai Pelatihan Yang Layak	50.000.000	DD	Swakelola
2	Peningkatan Mutu Jalan Kelompok 6	9	Belum Lancarnya atau Infrastruktur Kurang Memadai	Lancarnya Infrastruktur	40.000.000	DD	Swakelola

3	Irigasi Pulau Muncak- Palak Langang	2	Belum Lancarnya Pengairan Sawah Dari Palak Langang ke Labuhan Tanjak	Terdapatnya Pengairan yang Layak	1.000.000.000	APBD Kab/APBD Prov	Kerjasama Pihak Ketiga
4	Irigasi Palak Langang	2	Belum Lancarnya Pengairan Sawah Palak Langang	Terdapatnya Pengairan yang Layak	50.000.000	APBD Kab/APBD Prov	Kerjasama Pihak Ketiga
5	Normalisasi Banda PAUD	2	Banda PAUD Sudah Tidak Normal Lagi	Normalnya Banda PAUD	20.000.000	DD	Swakelola
6	Polongan /Jembatan dari TK/PAUD ke Mushola	11	Belum Terdapatnya Polongan	Terdapatnya Polongan	500.000.000	DD	Swakelola
7	Nama Jalan Nagari Senagari Air Haji Barat	11	Belum adanya nama jalan	terdapatnya nama jalan	250.000.000	DD	Swakelola
8	Stadium Mini Labuhan Tanjak	11	Belum Adanya Stadium Mini	Terdapatnya Staium Mini	500.000.000	DD	Swakelola
9	Parit buangan Mushollah Nurul Huda ke banda	7	belum lancarnya aliran buangan	terdapat aliran yang layak	200.000.000	DD	Swakelola
10	Rehabilitasi jalan rabat beton dekat rumah Toro	11	Belum Lancarnya atau Infrastruktur Kurang Memadai	Lancarnya Infrastruktur	100.000.000	DD	Swakelola
11	Rehabilitasi jalan rabat beton dekat rumah ison palak langang	11	Belum Lancarnya atau Infrastruktur Kurang Memadai	Lancarnya Infrastruktur	85.000.000	DD	Swakelola
12	Jalan lingkar Rumah ilin ke rumah pili	11	Belum Lancarnya atau Infrastruktur Kurang Memadai	Lancarnya Infrastruktur	100.000.000	DD	Swakelola

	13	irigasi sawah pulau muncak palak langang	7	Belum Lancarnya aliran sawah pulau muncak-palak langang	terdapatnya aliran yang layak	150.000.000	DD	Swakelola
<b>4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>							
	1	Pemeliharaan Rumah Tidak layak Huni(RTLH)	1	Keluarga yang belum Memiliki Rumah Yang Layak	Teradapatnya Rumah Yang Layah Huni	102.500.000	DD	Swakelola
	2	Jambanisasi	1	Keluarga yang belum Memiliki Jamban	Terdapatnya Jamban Yang Layak	23.000.000	DD	Swakelola
<b>5</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>							
	1	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup(BBGRM)	4	Pembersihan Lingkungan	Terdapatnya Nagari yang Bersih Lingkungan	6.000.000	DD	Swakelola
<b>6</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika</b>							
	1	Inforsmasi Komunikasi	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	50.000.000	DD	Swakelola
	2	Sarana Prasarana Prasarana PPIID	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	50.000.000	DD	Swakelola
	3	Kursi Tunggu	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	5.000.000	DD	Swakelola
	4	HP	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	10.000.000	DD	Swakelola
	5	Kursi Putar	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	2.000.000	DD	Swakelola

6	Lemari Arsip PPID	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	5.000.000	DD	Swakelola
7	Drone	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	20.000.000	DD	Swakelola
8	Papan Informasi	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	6.000.000	DD	Swakelola
9	Peningkatan Kapasitas PPID	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	60.000.000	DD	Swakelola
10	TV	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	4.000.000	DD	Swakelola
11	Anjungan Mandiri Desa	18	Desa Dinamis	Desa Dinamis dan Keterbukaan Informasi	20.000.000	DD	Swakelola
<b>JUMLAH</b>					<b>3.778.393.000</b>		
1	<b>Sub Bidang Ketentraman Ketertiban umum dan Perlindungan</b>						
1	Mitigasi Bencana	4	Siaga Bencana dan Lingkungan	Terdapatnya Nagari yang Siaga Bencana dan Lingkungan	65.000.000	DD	Swakelola
2	Kesiap Siagaan Bencana	4	Siaga Bencana dan Lingkungan	Terdapatnya Nagari yang Siaga Bencana dan Lingkungan	5.000.000	DD	Swakelola
2	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>						
1	Pembinaan Kesenian Tradisional	8	Kesenian Tradisional	Terdapatnya Nagari Yang Tanggap Budaya	20.000.000	DD	Swakelola
2	Pelatihan Imam Khatib	18	Pealatihan Imam Kahtib	Terdapatnya Imam Khatib yang Teralatih	3.000.000	DD	Swakelola

3	Pembinaan Kemasyarakatan	3	Pelatihan Majelis Taklim	18	Pelatihan Majelis Taklim	Meningkya Wawasan Majelis Taklim	6.000.000	DD	Swakelola
		4	Safari Ramadhan	18	Safari Ramdhan Pemerintahan Nagari	Terjalinya Silaturamhi Masyarakat dan Pemerintahan Nagari	9.000.000	DD	Swakelola
		5	MTQ Tingkat Kecamatan	8	MTQ	Terjalinya Silaturamhi Masyarakat dan Pemerintahan Nagari	20.000.000	DD	Swakelola
3	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>								
1	Pembinaan Kegiatan Olaaga	18	Olahraga	Terdapatnyan Nagari yang Dinamis	50.000.000	DD	Swakelola		
		2	Pembangunan Stsdium Mini Secara Bertahap/Sarpras Olraga	18	Sarparas Olahraga	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	150.000.000	DD	Swakelola
4	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>								
1	Pembinaan Lembaga Adat (KAN)	8	Nagari Tanggap Budaya	Terdapatnya Nagari yang Tanggap Budaya	2.500.000	PBH	Swakelola		
		2	Pembinaan LPMN	8	Lembaga Perdayaan Masyarakat	Lembaga Perdayaan Masyarakat	5.000.000	PBH	Swakelola
		3	Pembinaan PKK Nagari	18	Peremberdayaan Peremuan	Peremberdayaan Peremuan	5.000.000	PBH	Swakelola
		4	PHBN	18	Perayaan Hari Besar Nasional	Terciptanya Nagari Yang Dinamis	6.000.000	DD	Swakelola
		5	PHBI	18	Perayaan Hari Besar Islam	Terciptanya Nagari Yang Dinamis	6.000.000	DD	Swakelola
<b>JUMLAH</b>					<b>352.500.000</b>				
1	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari</b>								

4 Pemberdayaan Masyarakat

1	Pelatihan Wali dan Perangkat	18	Peningkatan Kapasitas Wali dan Perangkat	Teradapatnya Wali dan Perangkat yang Inovatif	43.474.000	DD	Kerjasama Pihak Ketiga
<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>							
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	18	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Ketaahanan Pangan Hewani	Meningaktnya Perekonomian Masyarakat dan Terpenuhinya Ketahanan Pangan	50.000.000	DD	Swakelola
<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>							
1	Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan	18	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Ketaahanan Pangan Nabati	Meningaktnya Perekonomian Masyarakat dan Terpenuhinya Ketahanan Pangan	75.000.000	DD	Swakelola
2	Peningkatan Produksi Peternakan	18	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Ketaahanan Pangan Hewani	Meningaktnya Perekonomian Masyarakat dan Terpenuhinya Ketahanan Pangan	75.000.000	DD	Swakelola
1	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>						
1	Penyertaan Modal BumNag	3	Pengadaa Modal BumNag	Teradapatnya Usaha Nagari Yang Baik	75.000.000	DD	Kerjasama Pihak Ketiga
2	Pelatihan Pengelolaan BumDesa (Pelatihan yang di Laksanakan Pemertihan Nagari)	18	Pelatihan BumNag	Terdapatnya Anggota BumNag Yang Terlatih	23.335.000	DD	Kerjasama Pihak Ketiga
1	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>						
	Bantuan BPJS Bagi Masyarakat Miskin	5	Masih Terdapatnya Warga Miskin yang Belum Memiliki Askes Kesehatan	Berkurangnya Waraga Miskin yang tidak Memiliki Askes Kesehatan	1.000.000.000	DD	Kerjasama Pihak Ketiga

		3	Pendidikan dan Kebudayaan	5	Pendidikan dan Kebudayaan	Terdapatnya Nagari yang berpendidikan dan Kebudayaan	20.000.000	DD	Swakelola
<b>JUMLAH</b>							<b>1.361.809.000</b>		
5	Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak	1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>						
		1	Penanggulangan Bencana Alam	1	Penanggulangan Bencana	Terdapatnya Nagari yang Tanggap Bencana	5.000.000	DD	Swakelola
		2	Keadaan Darurat	1	Peanggulangan Keadaan Darurat	Tertanganinya Keadaan Darurat	5.000.000	DD	Swakelola
		3	BLT	1	Peanggulangan Keadaan Mendesak	Tertanganinya Keadaan Mendesak	36.000.000	DD	Swakelola
<b>JUMLAH</b>							<b>46.000.000</b>		
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>6.202.026.856</b>		



Disusun oleh :  
Ketua Tim Penyusun RKP Nagari

  
**YUNOFION**

Lampiran II Form Nagari

**DAFTAR HASIL MUSYAWARAH NAGARI  
USULAN KEGIATAN PRIORITAS  
MENURUT ARAH KEBIJAKAN DAERAH  
Nagari Air Haji Barat**

No.	Kebijakan Daerah*	Usulan Kegiatan		Dukungan Dana Nagari		Sasaran Kegiatan	Volume	PD Penanggung jawab
		Paket kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp.)	Paket kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan	1. Penambahan RKB PAUD	800.000.000	Penyelenggaraan TK/PAUD	50.000.000	Anak-anak dan Masyarakat	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah melalui sektor pertanian, pariwisata dan perikanan	1. Pusat Pendaratan Ikan	10 Milyar	Pembangunan Pangkalan Pelelangan Ikan	100.000.000	Masyarakat	1 Paket	Dinas Perikanan dan Pangan
3.	Pemantapan industri pangan lokal dengan didukung oleh teknologi tepat guna	1. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Nagari	500.000.000	Penunjang Kegiatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari	200.000.000	Masyarakat	3 Paket	Dinas Pertanian
4.	Peningkatan infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Pengaspalan Jalan Nagari Air Haji Barat	6.000.000.000	Peningkatan Jalan Usaha Tani	100.000.000	Masyarakat	1 Paket	Dinas PUPR
5.	Percepatan Penghapusan Kemiskinan	1. Bantuan BPJS Bagi Masyarakat Miskin	100.000.000	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	72.000.000	Masyarakat	1 Paket	Dinas Sosial

6.	Penurunan Stunting	1. Jambanisasi	200.000.000	Penyelenggaraan Posyandu	80.000.000	Masyarakat	1 Paket	Dinas Kesehatan
----	--------------------	----------------	-------------	-----------------------------	------------	------------	---------	--------------------

\*Catatan : Setiap kebijakan daerah hanya 1 (satu) usulan kegiatan

Air Haji Barat , 25 November 2024  
 Wali Nagari Air Haji Barat  
  
 FEBY OKTAFIANTO

Lampiran III Form Kecamatan

**DAFTAR HASIL REKAPITULASI MUSYAWARAH NAGARI  
USULAN KEGIATAN PRIORITAS**

**MENURUT ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

**Kecamatan : Linggo Sari Baganti  
Nagari Air Haji Barat**

No.	Kebijakan Daerah	Usulan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Nagari)	Volume	Pagu (Rp.)	PD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan	1. Penambahan RKB PAUD Kasiah Bundodan II 2. Stadion Mini Labuhan Tanjak 3. Lanjutan Pembangunan Balai Pelatihan Pemuda dan Olahraga	Anak-anak dan Masyarakat Anak-anak dan Masyarakat	Air Haji Barat Air Haji Barat Air Haji Barat	1 Paket 1 Paket 1 Paket	300.000.000 800.000.000 400.000.000,-	Dinas Pendidikan Kabupaten Dinas PUPR Dinas PUPR
2.	Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah melalui sektor pertanian, pariwisata dan perikanan	1. Tempat Pendaratan Ikan 2. Irigasi Senagari Air Haji Barat 3. Aliran Jalur Kiri Daerah Irigasi Bubuk Buaya/ Rantau Simalenang 4. Normalisasi Banda Tapian Bayua Ke Sungai	Masyarakat Masyarakat Masyarakat	Air Haji Barat Air Haji Barat Air Haji Barat	1 Paket 1 Paket 1 Paket	10 Milyar 5.000.000.000 5 Milyar 600.000.000	Dinas Perikanan dan Pangan Dinas Pertanian Dinas PUPR Dinas Pertanian

		5. Normalisasi Banda Dekat Rumah Irat Ijon Ke Sungai	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	500.000.000	Dinas Pertanian
		6. Pengerasan Jalan Pulau Muncak	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	500.000.000	Dinas Pertanian Dinas
		7. Wisata Mangrove	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	500.000.000	Pertanian
		8. Wisata Pincalang Gadi	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	250.000.000	Dinas Pertanian
		9. Wisata Ikan Larangan	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	200.000.000	Dinas
		10. Penghijauan Pantai	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	500.000.000,-	Pertanian Dinas
		11. Perbaikan Jalan Rabat Beton ke Pasar Lama	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	300.000.000,-	Pertanian Dinas PUPR
3.	Pemantapan industri pangan lokal dengan didukung oleh teknologi tepat guna	1. Pengerasan Jalan Pulau Muncak	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	500.000.000	Dinas Pertanian
		2. Jalan Usaha Tani Bediang	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	100.000.000	Dinas Pertanian



		10. Lanjutan Rabat Beton Labuhan Tanjak-Palak Langang	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	500.000.000	Dinas PUPR
		11. Drainase Kiri Kanan Jalan Labuhan Tanjak-Palak Langang	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	1.000.000.000	Dinas PUPR
		12. Pengaman Tebing Dari Jembatan Air Haji Ke Jembatan Gantung	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	1.000.000.000	Dinas PUPR
		13. Pengadaan Mobil Damkar	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Unit	1.5 Milyar	Dinas Satpol PP dan Damkar
D	Percepatan Penghapusan Kemiskinan	1. Bantuan BPJS Bagi Masyarakat Miskin	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	100.000.000	Dinas Sosial
		2. Pelatihan Bordir	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	250.000.000.000	Koperasi, UKM dan Naker
		3. Pelatihan Menjahit	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	150.000.000	Koperasi, UKM dan Naker
6.	Penurunan Stunting	1. Jambanisasi	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	200.000.000	Dinas Kesehatan
		2. RTLH	Masyarakat	Air Haji Barat	1 Paket	500.000.000	Dinas PUPR

				Bara		000	
--	--	--	--	------	--	-----	--



Air Haji Barat, 25 November 2024  
Wali Nagari Air Haji Barat

*[Handwritten Signature]*  
FEBY OKTAFIANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT**  
**KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Jl. Raya Labuhan Tanjak - Muaro Gadang Air Haji

telp. -Kode Pos 25668

Labuhan Tanjak, 07 Oktober 2024

Nomor : 01/BAMUS-AHB/X/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada Yth :

1. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil IV
2. Camat Linggo Sari Baganti
3. TPP Kemendes
4. UPT Puskesmas Air Haji
5. BPP Kecamatan LSB
6. KUA Kecamatan LSB
7. KORLAP KB
8. Bamus Nagari Air Haji Barat
9. LPMN Nagari Air Haji Barat
10. Babinsa
11. Babhinkamtibmas
12. Kelompok Masyarakat
13. Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda Pemudi, Bundo Kandung dan lain-lain.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang tahapan perencanaan Pembangunan Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari dan Permendes Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 22 ayat (1) tentang RKP Nagari.

Berkaitan hal tersebut di atas Dengan mengharap Ridho Allah SWT Maka dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu saudara/i untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis/10 Oktober 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Gedung Serbaguna Air Haji Barat  
Acara : MusNag RKP Nagari Tahun 2025 dan DU-RKP Nagari Tahun 2026

Demikianlah undangan ini kami buat agar Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghadiri,atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT  
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Jl. Raya Labuhan Tanjak - Muaro Gadang Air Haji

telp. -Kode Pos 25668

**BERITA ACARA**

Musyawarah Nagari (MUSNAG) RKP 2025 dan DU RKP 2026

**NAGARI AIR HAJI BARAT  
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Dalam rangka Musyawarah Nagari (MUSNAG) RKP 2025 dan DU 2026 Tahun 2024 di Nagari Air Haji Barat, yang dihadiri oleh Wali Nagari, Kepala Nagari, BPP TPP Kemendesa, BPP dan tokoh masyarakat dari berbagai unsur.

acara ini dilaksanakan di Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti, kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, maka :

Hari dan Tanggal : Kamis 10 Oktober 2024  
 Jam : 08.00 sd selesai  
 Tempat : Gedung Pemuda dan dahraga

Telah diselenggarakan Review dan Evaluasi terhadap Review RPSM Nagari Nagari yang dihadiri oleh Pemerintah / Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran **Daftar Hadir**.

Materi atau Topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

1. Penyampaian capaian target RKP
2. Penyampaian dan arahan dari TPP Kemendesa
3. Pemilihan tim RKP, Wakil, TPP
4. Hal lain yang di angkat para

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber**

Pimpinan Rapat : Yunofion  
 Sekretaris/Notulen : Indra Yoni  
 Nara Sumber :

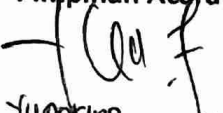
- |                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| 1. Feby Octakanto | dari | Wali Nagari  |
| 2. Kamil Jati     | dari | PP Kemendesa |
| 3. Sri Tita       | dari | BPP LSB      |
| 4. ....           | dari | .....        |
| 5. ....           | dari | .....        |

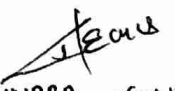
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya peserta Munsyawahar memutuskan beberapa hal yang **Berketetapan menjadi keputusan akhir dari Pertemuan** yaitu :

1. Penyampaian Program Kegiatan tahun 2024 dan Cerdas PKP
2. Asuhan teknik dari TPP KENYERASA dan Pemilihan dm PED. Vertikali Kegiatan dan TIM TPAP
3. Asuhan tentang Pertanian

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya :

Air Haji Barat, 10 Oktober 2024

Pimpinan Acara  
  
 (.....Yundion.....)


Natulis / Sekretaris  
  
 (.....INDRA YENI.....)

Mengetahui :









WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

BAMUS NAGARI AIR HAJI BARAT

  
**FEBY OKTAFIANTO**

  
**MARKIS KS**

Menyetujui peserta:

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
	SINOF EFENDI	penyuluh Agama		
	ARMAL	DT BGD Sufi		
	DARNAWATI	DI LELOBANDAR		
	FYHA NI	LB tanyak		
	MUSLIFEMDI	LB. Tanjung		
	SYAIFUL	LB TANJUK		
	Indra wati	GERU PIDA		
	SRI ISMARNI	MASYARAKAT		



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT**  
**KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Jl. Raya Labuhan Tanjak - Muaro Gadang Air Haji

telp. -Kode Pos 25668

Air Haji Barat, Tanggal 10 Oktober 2024

**Notulen:**

Pada penyampaian waku wagan bahwa proses kaylater yang sudah terlaksana sejumlah 80%.

capaian SDGs sudah 102 %, proyekta selatar 80 persen.

Tim PEP yang terdih tahun 2025

1. Ylinofion

2. Elang waki

3. Indra Yeni

4. Egi Dkh wabrakar

5. Arigati

6. Sri Isahani

7. Rio Sayutra.

Tim Verifikasi

1. PBT1

2. Yusti Ependi

3. Hender Yeni

4. Saipal

5. Narni

TPHP:

1. Gusti Sartika

2. Peni Busukto

3. Rizky Zulkita

Usulan<sup>(2)</sup> dari Perwakilan Masyarakat

1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD

2. DAN Surgai

3. NORMATISASI Benda PAUD

4. Rapat Bekerja Se Negeri Aso Hasi Barat

5. Pengawasan Jalan

6. Usulan lain yang dilampirkan sesuai keefektifan

yang telah terpisahkan oleh benda acara ini.

Demikianlah Benda acara ini di buat sebagaimana


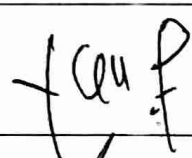





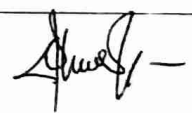













Merupakan :




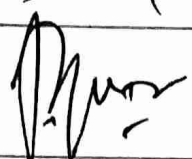

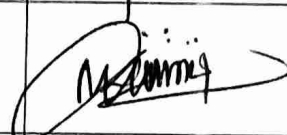

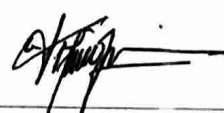

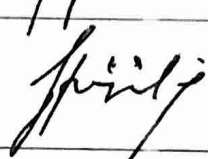



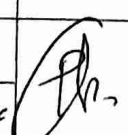






DAFTAR HADIR

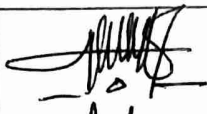
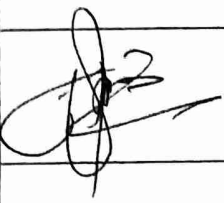

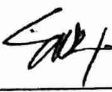
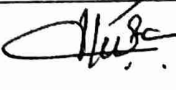









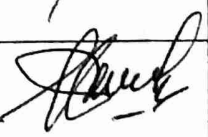





Musyawarah Nagari (MUSNAG) RKP 2025 - DU RKP 2026





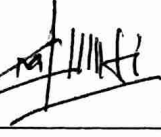
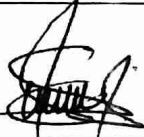












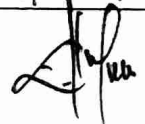



Hari / Tanggal/Tahun : Kamis 10 Oktober 2024

Tempat : Gedung Pemuda Okhrosa

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
	Fitri Oktafiah	Wakil Nagari	B. Tanjung		
	JUNOFION	Perangkat	LB. Tanjung		
1	MULYADI	Masyarakat	DURIAN PANDAN		
2	RYANI	- - -	L.B. Tanjung		
3	KARIM	- - -	L.B. Tanjung		
4	Pitri	- - -	Durian Pandan		
5	Etnawati	- - -	Durian Pandan		
6	Jusmawati	- - -	Durian Pandan		
7	Raminis	- - -	DR. PANDAN		
8	Rina	- - -	Durian Pandan		
9	HENDRI YENI	Pengurus SPP	LB. TANJAK		
10	IMSWENI	Guru MDA	lb. Tanjung		
11	LISMAINI	Masyarakat	LB. Tanjung		
12	Ludrawati	GURU MDA	DR. Pandan		
13	Demetra biswato	Guru	LB. Tanjung		
14	AMRIL	masyarakat	LB. Tanjung		
15	RIO	KA - - -	LB. TANJUK		
16	Gusta Supra	- - -	D. Pandan		
17	MARNI	- - -	DR. Pandan		
18	NUR AFNA	masyarakat	DR. Pandan		
19	ROSMAINI	- - -	- - -		

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
20	PIKA	WAS	DR. Pandan		
21	4PIK	- 11 -	LB. Tanjung		
22	ANI	- 11 -	DR. Pandan		
23	IDES	- 11 -	- 11 -		
24	Boby Rahmatan	Kep. Tanjung	PL. Lanyang		
25	DAFRANI/IDA	- 11 -	DR. Pandan		
26	Aldi Bendri	Buru MDA	lb. Tanjak		
27	Mona Ratun	Kader KPM	lb. Tanjung		
28	NANANG	masyarakat - Pandan	DR. Pandan		
29	AFRANDI	PEMUDA DR. Pandan	DR. Pandan		
30	LENA MARDIA	KADER	11		
31	ZAINAL A.	masyarakat	Ar. Pandan		
32	<del>EPI</del> EPI	- " -	DR. Pandan		
33	LIZA	- " -	DR. Pandan		
34	ARUL	- " -	DR. Pandan		
35	RAMINIS	- " -	- " -		
36	PENI	- " -	LB. Tanjung		
37	ERLENI	BAMUS	LB. Tanjung		
38	SEFFI XILO PUKA	BAMUS	LB. Tanjung		
39	ARANSZ	DR. BENDOSATI/LB. TJK			
40	RIZKY 2	- " -	DR. Pandan		
41	SRI ISMARNI	MASYARAKAT	PL. LANTANG		
42	SRITIRTA SST	Kepala BPP	PSR Bulket		
43	Sukri Agus	BAMUS	Durian Pandan		

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
44	DENI KURNIAWAN	Petangkat	LB. tanjak	Duni	
45	ARDI	K. kampung	Durian pandan		
46	YUSLI EFFENDI	Alim Ulama	LB. tanjak		
47	DARNAWIN	DIT LELORAN	DR. PANDAN		
48	ENDANG E.	KOR. BER	LS, tanjak.	Endang	
49	ENDRA TEN	KOR. BKB	LS, tanjak.		
50	YUSRITA	Mary	- " -		
51	Sirofjandi	Pony. Agam	U. tanjak		
52	Yeni. Sireja	MRT			
53	ADIBA	Pemudi	Palak langang		
54	SAHUL	Mas. praf	LB. tanjak.		
55	SALWA	Pemudi	PL. Langang	Hana	
56	Helmi Puja	KADERBKB	LB. tanjak		
67	INDRA YEM	Petangkat	Palak langang	Za.	
68	ZAKIA	MASYA.	LB. TANJAK		
69	SETRI WIZANTI	GURU TK	LB. TANJAK	Setri	
70	DAHLIA MARTAS	GURU TK	LB. TANJAK		
71	LAURA ANGERANI	GURU TK	LB. TANJAK	Lura	
72	YADI	DITIPAK	EBI LUTU		
73	Kamil Juri	TOP/PLD	LB. tanjak		
74	Marks 4	P. dinas	LB. tanjak		
75	Edison 888	BAMUIS	LB. TJE		
76	Raja febrianti		DR. pandan		
77	Melly		A pandan		

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
78	Yunita Rosnoli	Perangkat	Lb. Tanjung		
79	Lidrawati	Perangkat	Pl. Langang		
80	ALFIA ANITA SARI	MASY	Palak Langang		
81	Cendra Arizal	Masy	Lb. Tanjung		
82	METRI TENSI	MASY	PL. LANGANG		
83	Siska Perca	perangkat	Lb Tanjung		
84	MIS YULIA SARI	kader	Lb Tanjung		
85	MASHI	Masyarakat	— " —		
86	PERI.	"	PL. LANGANG		
87	AMISMA	"	"		
88	Bika Syah Putri		"		
89	Piilo Syah Putra		"		
90	SYAFRIANI		"		
91	Harwinda	kader / masyarakat	PL. Langang		
92	Widrawati	kader / masyarakat	PL. Langang		
93	Linda Asmika P.	— " —	— " —		
94	PODON	masyarakat	— " —		
95	ILMADANI	— " —	— " —		
96	INDRA YENI				
97	Devi Parima Uli	perangkat	Lb. Tanjung		
98	HOPPRIMAKI ANTI	perangkat	Dr. pandan		
99	DIA FEBRI SARI	Masyarakat	Lb. Tanjung		
100	Monisa Eka Febrianti	Masyarakat	Lb. Tanjung		



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI  
PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT

Jl. Labuhan Tanjak-Muaro Gadang.

Telp.

Kode Pos. 25668

Labuhan Tanjak, 25 Oktober 2024

Nomor : 28 /PN-AHB/X/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

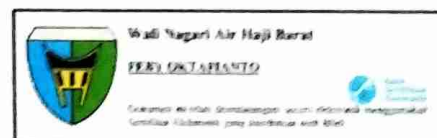
Kepada Yth :  
1. Camat Linggo Sari Baganti  
2. TPP Kemendes Linggo Sari Baganti  
2. Tim RKP Nagari Air Haji Barat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan dan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nag ) Tahun 2025, maka kepada Bapak/Ibu/sdr/i diundang untuk bisa hadir pada acara yang akan dilaksanakan Pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 28 Oktober 2024  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Kantor Wali Nagari Air Haji Barat  
Acara : 1. Penyusunan Rancangan RKP Nagari  
2. Hal lain yang dirasa perlu

Demikian Undangan ini disampaikan, kehadiran Bpak/ibu/sdr/i sangat diharapkan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI  
PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT**

Jln. Labuhan Tanjak – Muaro Gadang Air Haji Km. Telp. Kode Pos 25668.

**BERITA ACARA**

**NAGARI AIR HAJI BARAT**

**KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Dalam rangka Pembahasan rencana kerja pemerintah Nagari  
Tahun 2024 di Nagari Air Haji Barat, yang di hadiri oleh Klasi Nagari, prang  
ked. Tim KKP

acara ini dilaksanakan di Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti, kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra barat, maka :

**Hari dan Tanggal** : Senin 28 Oktober 2024  
**Jam** : 13.30 WIB  
**Tempat** : Kantor Klasi Nagari Air Haji Barat

Dalam hal ini dapat dihasilkan

1. Pembahasan rencana kerja pemerintah Nagari Air Haji Barat tahun 2025 dan daftar usulan 2026
2. Hal-hal yang dirasa perlu

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya :

**Pimpinan Rapat**

[Signature]  
TUNDAFION

**Air Haji Barat, 28 Oktober 2024**

**Natulis / Sekretaris**

[Signature]  
LIDIAWATI S-Pd





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**  
**PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT**  
Jln. Labuhan Tanjak – Muaro Gadang Air Haji Km. Telp. Kode Pos 25668.

Air Haji Barat, Tanggal 28/ Oktober - /2024

**AGENDA:**

Pembahasan mengenai kegiatan yang akan di Prioritaskan pada tahun 2025 dan daftar usulan Tahun 2026

Kegiatan yang akan direvisikan kelengkapan finishing lajak atau tudeknya untuk di Panai tahun 2025

Pada bidang pembangunan seperti penambahan PAB atau belayar, lanjutan pembangunan Balai pelatihan masyarakat, Pembangunan Stadion mini secara bertahap

Pada bidang pemberdayaan Pengadaan pelatihan, Qasidah, Pelatihan Min Jir Takum berbagai kegiatan lainnya.

Bidang Kesehatan  
Penambahan Posyandu di Tamrin beserta kelas posyandu

Peralatan dan sarana prasarana penunjang  
PPIB Negeri Air Haji Barat.  
dan berbagai kegiatan lainnya.




**WALINAGARI AIR HAJI BARAT**



**FEBY OKTAFIANTO**